
Mengenal Cara Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menggunakan Media

Andi Haris

Dosen pada Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245-Indonesia
Corresponding author: aharis@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini didasarkan pada ulasan literatur yang dipadukan dengan observasi lapangan yang meneliti proses aktivitas pemberdayaan komunitas. Diketahui bahwa pemberdayaan komunitas adalah topik utama yang banyak dibahas oleh berbagai pihak, dengan tujuan utama adalah pengembangan komunitas. Melalui aktivitas pemberdayaan ini, kelompok sasaran dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan mereka dengan diberikan edukasi, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketidakberdayaan, isolasi, dan ketertinggalan. Selanjutnya, melalui aktivitas pemberdayaan ini, diharapkan klien dapat bekerja secara independen sehingga kebutuhan dasar mereka dapat tercukupi.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Masyarakat, Media*

Abstract

This article is based on a literature review combined with field observations examining the process of community empowerment activities. It is known that community empowerment is the main topic that is widely discussed by various parties, with the main aim being community development. Through these empowerment activities, the target group can improve their standard of living and welfare by providing education, training and other activities aimed at freeing them from helplessness, isolation and underdevelopment. Furthermore, through this empowerment activity, it is hoped that clients can work independently so that their basic needs can be met.

Keywords: *Empowerment, Society, Media*

1. PENDAHULUAN

Pada bulan September 2000, KTT MDGs PBB dihadiri oleh 189 negara yang diwakili oleh pemimpin masing-masing negara. Mereka sepakat untuk mengadopsi deklarasi MDGs yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah global, termasuk kemiskinan, kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan anak dan ibu, serta penyakit seperti HIV/AIDS dan malaria. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan membangun kemitraan global dalam pembangunan. Meskipun ada yang merasa pesimis tentang kemungkinan mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015, hal ini tidak mengurangi komitmen terhadap Deklarasi MDGs yang disepakati oleh lebih dari seratus negara saat itu. Sebagai contoh, upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat terus didorong, baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh aktivis LSM. Terlebih lagi, dengan munculnya berbagai masalah sosial yang beragam, ini mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi ketertinggalan, isolasi sosial,

dan masalah-masalah serupa. Selain itu, melalui pemberdayaan masyarakat, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan klien dapat ditingkatkan, yang sangat membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka.

Memang benar bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seringkali menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama dalam hal pendanaan yang diperlukan dan profesionalisme fasilitator yang terlibat. Dalam konteks ini, penting bagi penyuluh yang dipilih untuk peran mereka tidak hanya memiliki keterampilan dalam membangun hubungan yang baik dengan kelompok penerima manfaat, tetapi juga untuk dapat memahami situasi sosial dan ekonomi serta nilai-nilai budaya kelompok klien. Hal ini krusial, karena beberapa kasus telah menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan fasilitator dalam menyebarkan inovasi adalah ketidakmampuan mereka dalam mengelola nilai-nilai budaya lokal, yang pada akhirnya menyebabkan reaksi penolakan dari kelompok yang sedang menjadi sasaran pemberdayaan.

2. PEMANFAATAN MEDIA

Pemanfaatan Media sebagai Sumber Informasi telah menjadi lebih mudah berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi informasi. Hal ini memungkinkan manusia untuk dengan lebih mudah mengakses berbagai sumber informasi tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, dan juga pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat ini termasuk buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan dokumen-dokumen arsip yang relevan dengan topik tersebut. Selain itu, media elektronik, terutama internet, juga menjadi saluran penting untuk mendapatkan informasi yang beragam mengenai konsep, prinsip, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berada di lapisan sosial yang lebih rendah, dapat diberdayakan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka sehingga mereka mampu memenuhi berbagai kebutuhan mereka di masa depan. Pemahaman tentang masalah pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek penting yang perlu ditekankan dalam upaya memberdayakan terutama kelompok yang dianggap rentan terhadap kemiskinan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan dan menghindari kondisi ketertinggalan. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Namun, istilah "pemberdayaan" sering kali disamakan dengan "pembangunan," meskipun keduanya memiliki hubungan erat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan konsep yang diterjemahkan dari kata "Empowerment," sedangkan pembangunan berasal dari kata "Development."

Meskipun demikian, kedua konsep ini tidak seharusnya diperdebatkan satu sama lain, karena keduanya selalu diarahkan pada upaya menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rappaport (1984), misalnya, menggambarkan pemberdayaan sebagai proses di mana individu, organisasi, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan

mereka. Di sisi lain, Osmani (2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai kondisi di mana individu yang kurang berdaya menciptakan situasi di mana mereka dapat mengungkapkan keinginan mereka dan merasa terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

3. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

Menurut World Bank (2001), pemberdayaan lebih berarti memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat, terutama keluarga miskin, untuk berbicara dan berpartisipasi dalam perumusan gagasan dan pendapat mereka. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk memilih solusi terbaik, baik dalam hal metode, produk, tindakan, maupun konsep, yang tidak hanya bermanfaat bagi keluarga dan diri mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Namun, terlepas dari semua hal tersebut, tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah:

1. Untuk memberikan individu, kelompok, dan masyarakat kekuasaan atas kehidupan mereka sendiri.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan martabat manusia sehingga mereka bisa keluar dari situasi kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan. Dengan demikian, kelompok yang sebelumnya tidak berdaya dapat menjadi mandiri dan tidak tergantung pada individu atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Melalui kegiatan ini, perubahan positif dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
4. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, beberapa hal perlu dilakukan, termasuk mengembangkan etos kerja yang kuat, berprinsip hemat, efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendorong prinsip keterbukaan. Prilaku dan budaya seperti ini memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan dalam masyarakat, membangun komunitas yang kuat, maju, dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat.

Namun, upaya untuk mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah seperti yang diharapkan banyak orang. Fakta di lapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan yang memperlambat pencapaian sasaran pemberdayaan masyarakat. Contohnya, kasus korupsi dalam penggunaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi marak. Selain itu, ketidaksetaraan dan diskriminasi di antara berbagai komponen masyarakat, kesulitan mencapai rasa keadilan terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, kinerja birokrasi yang dianggap tidak efektif, rumit, mahal, dan pelayanan publik yang kurang profesional juga menjadi masalah. Birokrasi yang seharusnya melayani publik bahkan cenderung lebih memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat.

Maka tidaklah mengherankan jika usaha yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan ini dengan efektif akan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu,

dibutuhkan juga dukungan dari beberapa faktor lain, termasuk alokasi dana yang memadai, kehadiran fasilitator, pendamping, atau agen perubahan yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam bidangnya, motivasi yang kuat dari kelompok yang membutuhkan pemberdayaan, kerja sama yang harmonis dan kokoh di antara semua komponen masyarakat yang berperan dalam kelancaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung semua aktivitas yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep pembangunan masyarakat (Community Development). Terkadang, kedua istilah ini digunakan secara bersamaan ketika seseorang berbicara tentang pembangunan masyarakat. Namun, ada pandangan yang menganggap pembangunan masyarakat sebagai usaha untuk membantu berbagai lapisan masyarakat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan lingkungan fisik mereka, sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat hanya dapat berhasil jika didukung oleh individu yang memiliki keterampilan, inovasi, kreativitas, etos kerja yang tinggi, keterbukaan terhadap perubahan dan perbaikan, serta kemampuan mandiri dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. Semua ini mendorong perubahan positif dalam masyarakat menuju perkembangan yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks proses pembangunan masyarakat. Terlebih lagi, partisipasi aktif dan kerja sama yang baik di antara semua elemen masyarakat sangat penting dalam mewujudkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera di semua aspek kehidupan manusia.

4. PRINSIP PEMBERDAYAAN

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah prinsip-prinsip pemberdayaan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang komprehensif, menyeluruh, dan lengkap, sehingga tujuan utama pemberdayaan kelompok yang dianggap sangat rentan terhadap kemiskinan dapat tercapai. Terutama, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam, pemilihan kebijakan yang tepat, efektif, dan optimal menjadi sangat penting. Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan, termasuk:

1. Kolaborasi dan partisipasi: Keberhasilan pemberdayaan hanya dapat dicapai jika ada kerjasama yang kuat di antara berbagai elemen masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam merealisasikan program yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Pemilihan metode yang sesuai: Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran

pemberdayaan, sehingga metode tersebut tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga bermanfaat dan berhasil.

3. Pendekatan demokratis: Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, prosesnya sebaiknya demokratis, dengan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih metode yang mereka anggap sesuai, termasuk dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat sendiri.
4. *Minat dan kebutuhan*. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat haruslah didasarkan pada sesuatu yang memang menjadi prioritas utama dan terkait dengan minat dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh lebih efisien dan efektif.
5. *Kelompok masyarakat bawah*. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program yang dibuat sebelumnya maka sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih diarahkan pada mereka yang termasuk dalam kategori orang pinggiran dalam arti berada pada tingkat akar rumput masyarakat.
6. *Keragaman budaya*. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seyogyanya disesuaikan dengan keragaman budaya lokal yang ada dengan alasan apabila kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan prinsip pada keseragaman budaya maka di khawatirkan hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan dan hambatan di lapangan.
7. *Terarah dan spesialis*. Untuk konteks ini tenaga fasilitator/ penyuluh/agen pembaharu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terdiri orang yang memiliki keahlian serta keterampilan dalam hal tertentu terutama pada kegiatan yang membutuhkan tenaga spesialis untuk kegiatan yang merupakan bagian dari agenda pemberdayaan masyarakat.
8. *Belajar sambil bekerja*. Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sekedar dilakukan dalam bentuk menyampaikan konsep dan gagasan yang bersifat teoritis akan tetapi yang jauh lebih penting yaitu mengikutsertakan secara aktif kelompok sasaran untuk mencoba melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tenaga fasilitator sehingga dengan demikian masyarakat dapat bekerja sambil belajar menggunakan konsep yang mereka peroleh dari para penyuluh.
9. *Perubahan budaya*. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan sesuai dengan nilai budaya lokal kelompok sasaran. Dengan demikian dapat dihindari timbulnya kejutan budaya di kalangan kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dan oleh sebab itu para penyuluh sangat diuntut untuk bertindak secara hati-hati dan harus mengetahui terlebih dahulu dengan baik nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan.
10. *Kepemimpinan*. Maksudnya kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak boleh hanya menguntungkan pada satu pihak saja misalnya di kalangan mereka yang melakukan

penyuluhan. Tapi, justru yang diinginkan yaitu hendaknya kegiatan pemberdayaan ini dapat di manfaatkan tokoh masyarakat yang ada dan di harapkan dapat membantu kelancaran kegiatan pemberdayaan.

11. *Segenap keluarga*. Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan di kalangan tenaga penyuluh sebaiknya memperlakukan keluarga sebagai suatu bagian sistem sosial dengan cara mengaktifkan peran anggota keluarga untuk saling bekerja satu sama lain agar supaya harapan untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan dapat terealisasi.

Sementara itu menurut pendapat beberapa pakar lain yang kemudian di rumuskan oleh Suharto (2005) menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial diantaranya: *Pertama*, pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. *Kedua*, proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber- sumber dan kesempatan- kesempatan. *Ketiga*, masyarakat harus di melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. *Keempat*, kompetensi diperoleh atau di pertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. *Kelima*, solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut. *Keenam*, jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. *Ketujuh*, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. *Kedelapan*, tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. *Kesembilan*, pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. *Kesepuluh*, proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi. Akhirnya kesebelas, pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

5. TUJUAN

Sebagai suatu proses sosial yang dinamis, pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara fasilitator, pemerintah, dan kelompok sasaran. Tujuan utama dari proses pemberdayaan adalah menciptakan perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat lapisan bawah. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan dengan tujuan berikut:

1. Mengenalkan konsep dan inovasi baru kepada kelompok sasaran, baik dalam bentuk gagasan, perilaku, maupun hasil karya manusia.
2. Memberikan keterampilan kepada masyarakat dan membantu mereka melaksanakan kegiatan mandiri sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
3. Meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang mana di harapkan dengan semakin membaiknya pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi tersebut akan berdampak pada munculnya sikap serta perilaku mereka untuk bisa bekerja lebih kreatif dan inovatif.
4. Kalau pun sekiranya ada bantuan dalam bentuk modal untuk berusaha maka semua itu di maksudkan untuk lebih mendorong kreativitas kelompok sasaran agar mereka bisa bekerja mandiri dan tidak senantiasa mengharapkan bantuan orang lain
5. Karena proses pemberdayaan masyarakat ini pada prinsipnya untuk membangun motivasi dengan memanfaatkan semua potensi yang di miliki oleh masyarakat maka mau tak mau kegiatan yang di lakukan senantiasa mendapat bimbingan serta pengawasan dari tenaga fasilitator agar supaya apa yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut dapat tercapai

Salah satu faktor yang dapat mendukung pencapaian tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan yang dimaksud berkaitan dengan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat yang menjadi target pemberdayaan bersedia menerima inovasi-inovasi yang bertujuan untuk membantu mereka keluar dari berbagai tantangan, seperti keterbelakangan, isolasi sosial, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam berbagai sektor sosial. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kelompok sasaran sangat penting. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pendekatan meliputi perencanaan yang matang, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, pemimpin agama, generasi muda, dan kelompok lain yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dalam konteks pembentukan kelompok dan bukan dilakukan secara individu, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, melalui pendekatan kelompok, pelaksanaan kegiatan dapat menjadi lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan hasil yang optimal jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan secara perorangan. Selain itu, pendekatan kelompok lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada satu rumah tangga. Kedua, pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memungkinkan mereka untuk belajar dan mengaplikasikan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh fasilitator. Ketiga, tujuan kegiatan harus jelas dan terarah, termasuk

manfaat yang dapat diperoleh oleh kelompok sasaran, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Keempat, diperlukan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tanpa dukungan dana yang memadai, program yang dirancang dengan baik akan sulit diimplementasikan, terutama dalam hal pengadaan infrastruktur dan alat peraga yang diperlukan, serta melibatkan tenaga profesional. Kelima, aspek budaya yang dimiliki oleh kelompok sasaran harus diperhatikan dengan serius. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penolakan dari masyarakat setempat seringkali disebabkan oleh faktor tradisi dan kepercayaan yang kuat, yang dianggap tidak sesuai dengan inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Oleh karena itu, perubahan sikap dan perilaku masyarakat memerlukan pendekatan persuasif daripada kohersif. Dengan demikian, kelompok sasaran akan lebih menerima program dengan sukarela tanpa merasa adanya tekanan dari pihak luar, sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dalam suasana yang baik.

6. PENDEKATAN

Sementara itu, dalam konteks pekerjaan sosial, terdapat setidaknya tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaharu, aktivis LSM, dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan Mikro Dalam pendekatan ini, pemberdayaan dilakukan pada tingkat individu, seperti dalam bentuk konseling, bimbingan, dan pengendalian stres. Tujuan utamanya adalah melatih dan memberikan panduan kepada individu yang menjadi kelompok sasaran (penerima manfaat) agar dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berpusat pada tugas.
2. Pendekatan Mezzo Berbeda dengan pendekatan mikro yang berfokus pada individu, pendekatan mezzo justru mengarahkan pemberdayaan kepada sekelompok penerima manfaat. Dalam pendekatan ini, tujuan pemberdayaan ditujukan kepada kelompok klien dengan harapan bahwa kelompok tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk pendidikan, pelatihan, dan intervensi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap, serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (penerima manfaat) dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
3. Pendekatan Makro Pendekatan ini dikenal sebagai strategi sistem yang lebih luas, di mana penerima manfaat (klien) diarahkan ke lingkungan yang lebih besar. Selain itu, terdapat beberapa jenis strategi yang termasuk dalam pendekatan makro, seperti perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying, dan manajemen konflik. Pendekatan ini juga menganggap bahwa kelompok sasaran (penerima manfaat) memiliki kemampuan untuk memahami situasi mereka sendiri

dan memilih strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

4. Selain beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas, tampaknya ada juga beberapa jenis pendekatan lain yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat menyebut model pendekatan yang digunakan oleh Elliot (1996) yang mengidentifikasi 3 jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
5. Pendekatan Kesejahteraan: Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk mereka yang mengalami musibah seperti bencana alam, seperti banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, atau bencana alam lainnya.
6. Pendekatan Pembangunan: Pendekatan ini berfokus pada upaya meningkatkan kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan.
7. Pendekatan Pemberdayaan: Dalam pendekatan ini, berbagai bentuk pelatihan dilakukan di antara kelompok sasaran (klien) untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan, keterpurukan, dan ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk kelompok yang mandiri, maju, dan bebas dari ketidakberdayaan.

Menurut Axinn (1988), untuk lebih memahami secara detail pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, jenis pendekatan yang digunakan dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Pertama, terdapat pendekatan komunitas. Kedua, terdapat pendekatan umum. Ketiga, terdapat pendekatan proyek. Keempat, terdapat pendekatan kerjasama. Kelima, terdapat pendekatan partisipatif. Keenam, terdapat pendekatan pelatihan dan kunjungan. Ketujuh, terdapat pendekatan lembaga pendidikan. Dan terakhir, terdapat pendekatan pembangunan sistem usaha tani.

Karena kompleksitas berbagai jenis pendekatan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, tidaklah mengherankan jika Mardikanto (2012) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip pemberdayaan yang dapat dijadikan kerangka acuan, yaitu:

1. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kejelasan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Efektivitas pemberdayaan terkait dengan kedisiplinan, keseriusan, dan sikap profesional para fasilitator.
3. Kemauan dan partisipasi masyarakat dalam konteks pengabdian pemberdayaan tergantung pada sejauh mana mereka diberi kesempatan dalam proses perumusan tujuan program dan pemilihan mereka yang terlibat di lapangan.
4. Pemanfaatan kombinasi pengetahuan dan informasi, baik dari dalam maupun luar masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan.

5. Penting untuk mempertimbangkan faktor budaya masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan.
6. Sistem administrasi pemerintahan yang bersifat desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
7. Pendekatan gender perlu diperhatikan untuk lebih efektif dalam melayani klien (penerima manfaat) bersama para fasilitator.
8. Efektivitas pemberdayaan dapat ditingkatkan jika terdapat kontak dan komunikasi yang aktif antara fasilitator dan penerima manfaat dalam masyarakat yang lebih tertutup.
9. Suatu kepemimpinan yang efektif sangat mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan.
10. Komunikasi timbal balik antara peneliti, penjual produk, penyedia input, dan masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan. Peran fasilitator memiliki dampak yang signifikan dalam menggalakkan dan mendorong partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi proses belajar dan adopsi inovasi.
11. Tingkat pemahaman yang kuat di antara para pelaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program tersebut.
12. Keselarasan antara biaya yang dikeluarkan dalam program pemberdayaan dengan manfaat yang diperoleh dari program tersebut akan semakin meningkat jika berbagai faktor yang memengaruhinya diperhitungkan secara terus-menerus di berbagai lokasi pelaksanaan program.
13. Upaya menjaga kelangsungan program dapat dilakukan dengan efektif jika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
14. Keseimbangan antara fleksibilitas, responsivitas terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta tujuan yang diberlakukan dalam peningkatan produksi sangat penting dalam menentukan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan perhatian utama. Jika terlibat dalam pemberdayaan dengan pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat, hal ini dapat menyebabkan kerugian materi, pemborosan waktu, dan hasil yang kurang optimal. Terlebih lagi, kelompok sasaran memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik mereka, termasuk kemampuan, persepsi, perilaku, dan budaya lokal.

Sebelum melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan merancang program untuk klien, sangat penting untuk melakukan studi peninjauan untuk memahami situasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang dipilih juga harus dapat memotivasi dan menginspirasi para penerima manfaat agar dapat mengelola inovasi dan dukungan lainnya

dengan baik, dengan harapan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

1. Penting untuk diakui bahwa pendekatan yang digunakan harus mencakup berbagai perspektif masyarakat, sehingga dapat mengatasi tantangan yang kompleks, termasuk potensi penolakan dari masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat yang ada dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tersebut cocok untuk diterapkan. Mudah dipahami dan dimengerti kalangan kelompok penerima manfaat
2. Pendekatan itu dinilai lebih efisien dan efektif dalam arti memiliki model yang sederhana namun bisa memberi manfaat yang maksimal bagi klien
3. Melibatkan fasilitator yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidangnya sehingga mereka mampu bekerja secara profesional
4. Sekalipun pendekatan tersebut menciptakan perubahan bagi masyarakat tapi bukan berarti menghilangkan sama sekali nilai budaya lokal yang selama ini menjadi faktor perekat solidaritas sosial diantara sesama warga masyarakat karena tidak semua individu yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki kompetensi yang sama maka pendekatan yang digunakan haruslah bisa mengakomodasi berbagai bentuk kekurangan yang dimiliki masyarakat dan kemudian secara persuasif mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki individu tersebut lalu melepaskan mereka dari perangkap keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan.
5. Penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus pula dilakukan secara cermat, terukur, teliti, bertahap, berkelanjutan serta tepat sasaran sehingga semua elemen yang menjadi kelompok penerima manfaat dapat diberdayakan dengan utuh dan tanpa merasa ada yang diperlakukan diskriminatif dari mereka yang memberi kontribusi bagi keberhasilan kegiatan tersebut.
6. Agar supaya pendekatan ini dapat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang mandiri maka tentu prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsif dan kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kelompok sasaran yang diposisikan sebagai klien maka untuk membedakan antara kelompok ini dengan warga masyarakat lainnya paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya karakteristik sosial, ekonomi, dan perilaku individu. Dalam hal ini, pada dasarnya mereka yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari keluarga yang berada pada lapisan sosial bawah misalnya saja kaum orang pinggiran atau keluarga miskin yang mana pada umumnya mereka dianggap sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang didalamnya mencakup sandang, pangan, dan perumahan yang layak. Itulah sebabnya melalui kegiatan pemberdayaan tersebut mereka di harapkan dapat di tingkatkan taraf hidup serta kesejahterannya lewat peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan yang mana semua ini di pandang penting sebagai modal

sosial guna dapat bekerja dengan mandiri sehingga keinginannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dapat terealisasi. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejumlah pakar ilmu sosial tentang konsep kelompok sasaran dan penerima manfaat yang dalam hal ini ada sebagian di antara mereka yang membedakan kedua istilah tersebut namun sebetulnya apabila di kaji lebih jauh mengenai makna kedua konsep di atas yang mana pada prinsipnya memiliki substansi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pem-berdayaan, Pengembangan Mas-yarakat dan Intervens Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ala, Andre Bayo.1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerang Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Alvin, Y. SO. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta:LP3ES.
- Anwas, M Oos.2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Axinn.G.H.1988. *Guide on Alternative Extension Approaches*. Romeo: FAO.
- Baldwin, E, Robert. 1981. *Pem-bangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bhatnagar. 1990. *Education and Communication for Develop-ment*. New Delhi : Oxford & IBH Publishing CO.
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: T.Gramedia.
- Bryant, Coralie.1987. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta:LP3ES.
- Chambers,Robert.1987. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Clements P, Kevin. 1997. *Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Combs H, Philip .1974. *Attacking Rural Poverty, How Non Formal Education Can Help*. Baltimore:The John Hopkins University Press.
- Elliot, J.A.1996.*An Introduction to Sustainable Development: The Developing world*.Routledge. London and New York
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press
- . 2010. *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial*.Yogyakarta:Insist Press
- Havelock.1973. *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. N.J : Educational Technology Publications
- Hettne, Bjorn. 1985. *Ironi Pem-bangunan Di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- H.W.Arndt. 1983. *Pembangunan Dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- I.L.Pasaribu 1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat*.Yogyakarta: Liberty
- Korten, David C.1984.*Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Yayasan studi pembangunan.
- Lane, Jan Erik.1994. *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-
- Learner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta : Gajah Mada, University Press.
- Lewis P, John.1987. *Mengkaji Ulang Strategi- Strategi Pembangunan*.Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Long, Norman. 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Mardimin, Johannes. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*.Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- 1996. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mardikanto, Totok.2012*Pember-dayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Moeljarto.1987. *Politik Pembangunan*.Yogyakarta: Tiara Wacana
- Mountjoi B,Alan.1984.*Dunia Ketiga dan Tinjauan Permasalahannya*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Nasution, Zulkarimein.1988.*Komunikasi - Pembangunan*.Jakarta:Rajawali Pers
- Ndraha, Talizudulu. 1987.*Pem-bangunan Masyarakat Mempersiap-kan Masyarakat Tinggal Landas* Jakarta:PT Bina Aksara